

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA PEKANBARU

Hendra Mizkan, Kamaliah, Restu Agusti
Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Abstract The purpose of this research is to know if the management of finance Pekanbaru city was managed well, effective and efficient and if the management of finance is influenced toward the degree of society poverty Pekanbaru city. This research was conducted by using quantitative descriptive analysis method and double linear regression analysis. The data was collected by finding references and the field research was conducted in Development Planning Agency at Sub-National Level (Bappeda) Pekanbaru city, Central Bureau of Statistics (BPS) Pekanbaru city and Local Revenue Offices (Dispenda) Pekanbaru city. The result of research shows that in the seventh years lately (2006-2012) the degree of finance autonomy still in criterion “less” with the correlation pattern with center government has characteristic “instructive”, the degree of finance competence still in criterion “less”, the finance activity is included in criterion “good”, the finance effectivity is included in effective criterion, the finance efficiency is included in criterion “efficient”, the growth of finance is included in criterion “good”, whereas the degree of poverty is not taking down thoroughly. Neither in partial nor in simultaneously the management of finance is not influenced significantly toward the degree of poverty in Pekanbaru city.

Keywords: Finance autonomy, Finance competence, Finance activity, efficiency, Finance growth, poverty

PENDAHULUAN

Otonomi daerah membawa suatu kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan keuangan daerahnya dengan lebih baik, termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru. Pengelolaan keuangan daerah ini harus memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kota Pekanbaru ini, terutama dalam hal ini adalah pengentasan kemiskinan yang pada tahun 2013 mencapai jumlah 34.100 jiwa.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan. Dengan baiknya kinerja pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru maka hal

ini seharusnya berpengaruh secara positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Bappenas (2002), kemiskinan adalah suatu situasi dan kondisi yang dialami seseorang dan sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.

Tingkat kemiskinan ini seharusnya dapat diturunkan dengan adanya kinerja pengelolaan keuangan yang baik dari pemerintah. Untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah maka dapat menggunakan beberapa rasio keuangan.

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah menurut pendapat Halim (2008: 232) yang menyebutkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat daerahnya.

Untuk melihat ukuran pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah dapat digambarkan pada Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
0 - 25	Instruktif
> 25 - 50	Konsultatif
> 50 - 75	Partisipatif
> 75 - 100	Delegatif

Sumber: Halim (2001)

Sedangkan untuk melihat kriteria dalam menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Tingkat Kemandiran
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang

40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Bisma dan Susanto (2010:77)

Rasio kemampuan keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara besarnya Pendapatan Asli Daerah yang mampu diperoleh dibandingkan dengan besarnya seluruh pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber.

Adapun pola hubungan tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (%)	Tingkat Kemampuan
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Munir, dkk (2004)

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Untuk menetapkan bagaimana ukuran efektifitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Bisma dan Susanto (2010:78)

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Adapun kriteria untuk menetapkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100 %	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Bisma dan Susanto (2010:79)

Rasio pertumbuhan (growth ratio), Halim (2004 :128) berguna untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

PENELITIAN TERDAHULU

Berikut penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini:

1. Mehmood dan Sadiq (2010) dengan penelitian yang berjudul *The Relationship between Government Expenditure and Poverty: A Cointegration Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka pendek serta jangka panjang antara kemiskinan dan pengeluaran pemerintah.
2. Aryanto (2011) dengan penelitian terkait kemandirian keuangan kabupaten/kota di Sumatera Selatan. hasilnya nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi hanya sebesar 17,28% yaitu pada Kota Palembang, dan tertinggi kedua yaitu Kota Lubuk Linggau dengan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 6,94%. Daerah yang memiliki kemampuan keuangan terendah yaitu OKU Selatan dengan rasio kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 1,17%.
3. Bisma dan Susanto (2010), dengan penelitian berjudul *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi NTB TA 2003-2007*. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah.
4. Usman (2012) dengan penelitiannya yang menunjukkan bahwa kemandirian Pemerintah Kabupaten Gorontalo masih sangat rendah, rata-rata pertumbuhan PAD selama tahun analisis (2007-2010) tidak baik, dan dilihat dari rasio efektivitas menunjukkan bahwa

pengelolaan PAD telah efektif.

5. Astuti (2013) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian tahun 2007-2011 masih sangat rendah, Rasio efektifitas kinerja keuangan tahun 2007 tidak efektif, tahun 2008 menunjukkan kinerja keuangan cukup efektif, tahun 2009 dan 2010 menunjukkan kinerja keuangan sangat efektif, dan tahun 2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah efektif. Rasio efisiensi tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat efisien. Rasio aktivitas tahun 2007 dan 2011 menunjukkan bahwa rasio keserasian diprioritaskan untuk belanja rutin. Rasio Pertumbuhan APBD tahun 2007-2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negatif.

IV. METODE PENELITIAN

A. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik.

Data yang ada dikumpulkan dengan cara tinjauan pustaka dan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru dan Dinas Pendapatan (Dipenda) Kota Pekanbaru.

B. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol X dan variabel dependen atau terikat yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol Y. Berikut dijelaskan tentang operasionalisasi variabel penelitian:

1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang diduga memengaruhi variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X_1)

Rasio kemandirian dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Halim, 2004: 150):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

b. Rasio Kemampuan (X_2)

Untuk menghitung besarnya rasio kemampuan daerah dapat menggunakan rumus di bawah ini (Munir, dkk, 2004:105).

$$\text{Rasio Kemampuan Keuangan Daerah} = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Dimana:

- PAD_t = Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t
- TPD_t = Total Pendapatan Daerah Tahun t

c. Rasio Aktivitas (X_3)

Untuk menghitung rasio aktivitas dapat menggunakan rumus berikut (Halim, 2004:150):

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

d. Rasio Efektifitas (X_4)

Untuk menghitung rasio efektifitas keuangan daerah dapat menggunakan formula di bawah ini (Halim, 2004: 150):

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

e. Rasio Efisiensi (X_5)

Untuk menghitung rasio efisiensi keuangan daerah dapat menggunakan formula di bawah ini (Halim, 2004:150).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

f. Rasio Pertumbuhan (X_6)

Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PAD_{t_1} - PAD_{t_0}}{PAD_{t_0}}$$

dimana: t_0 = tahun awal dan t_1 = tahun akhir (Halim, 2004:150)

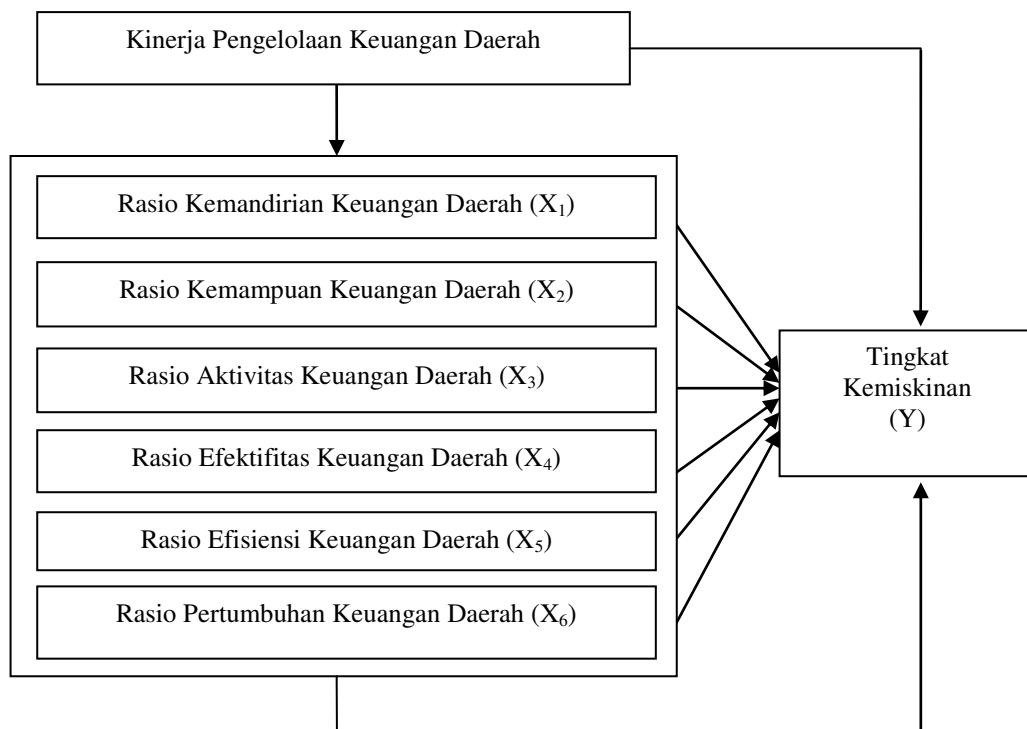
2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan (Y).

Data terkait tingkat kemiskinan ini dapat dilihat pada data BPS Kota Pekanbaru yang menunjukkan persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun.

C. Kerangka Berpikir

Adapun alur model penelitian yang menjadi kerangka dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

ASPEK KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Pada tahun 2012 penerimaan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini.

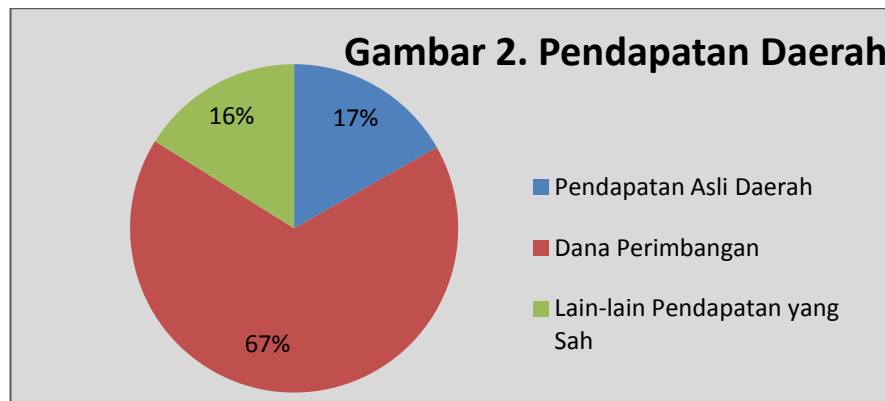
Tabel 6. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dirinci Menurut Jenisnya Tahun Anggaran 2012 (Dalam Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	REALISASI
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	309.534.196.196
1.1. Pajak Daerah	221.992.614.826
1.2. Retribusi Daerah	57.272.569.873
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.499.653.904
1.4. Lain-lain Pendapan Asli Daerah yang Sah	27.769.357.593
2. DANA PERIMBANGAN	1.238.475.235.191
2.1. Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	592.356.641.191
2.2. Dana Alokasi Umum	622.184.684.595
2.3. Dana Alokasi Khusus	23.933.910.000
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	296.873.359.061
3.1. Pendapatan Hibah	0
3.2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	158.704.056.466
3.3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	125.977.654.000
3.4. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	12.191.648.595
3.5. Dana Insentif Daerah	0
JUMLAH PENDAPATAN	1.844.882.790.448

Sumber: Bagian Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru

Berdasarkan Tabel 6 di atas komposisi pendapatan daerah Kota Pekanbaru dapat dijelaskan pada Gambar 2 di bawah ini.



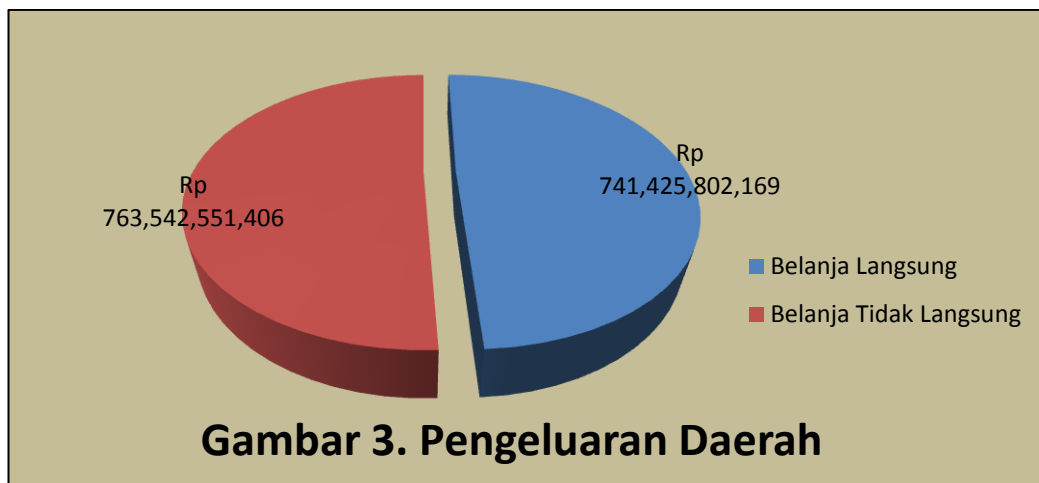
Penerimaan yang diperoleh dari Pendapatan Daerah, kemudian digunakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mendanai berbagai kegiatan daerah. Kegiatan ini dirinci dalam pengeluaran daerah yang dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. Realisasi Pengeluaran Daerah Kota Pekanbaru Dirinci Menurut Jenisnya Tahun Snggaran 2012 (Dalam Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	REALISASI
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	741.425.802.169
1.1. Belanja Pegawai	661.565.640.065
1.2. Belanja Subsidi	250.000.000
1.3. Belanja Hibah	48.751.186.104
1.4. Belanja Bantuan Sosial	29.959.000.000
1.5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	899.976.000
1.6. Belanja Tidak Terduga	0
2. BELANJA LANGSUNG	763.542.551.406
2.1. Belanja Pegawai	226.691.575.033
2.2. Belanja Barang dan Jasa	251.121.369.260
2.3. Belanja Modal	285.729.607.113
JUMLAH BELANJA	1.504.968.353.575

Sumber: Bagian Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat diketahui komposisi pengeluaran daerah. Gambaran belanja daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.



HASIL PENELITIAN

A. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X_1)

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari Bappeda Kota Pekanbaru terhadap Rasio Kemandirian Daerah dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Perhitungan Rasio Kemandirian Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2006-2012

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pusat dan Pinjaman	Rasio Kemandirian (%)
2006	104.462.323.814	788.876.514.618	13,24
2007	109.039.133.688	867.106.454.486	12,58
2008	147.875.831.331	983.797.047.419	15,03
2009	134.868.382.528	904.639.859.452	14,91
2010	158.830.632.372	1.024.522.675.400	15,50
2011	255.903.389.579	1.312.831.190.683	19,49
2012	309.534.196.196	1.535.348.594.252	20,16
Rata-Rata			15,84

Sumber: Data Diolah.

Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat diketahui pola hubungan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pusat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Hasil Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2006 – 2012

Tahun	Rasio Kemandirian	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
2006	13,24	Kurang	Instruktif
2007	12,58	Kurang	Instruktif
2008	15,03	Kurang	Instruktif
2009	14,91	Kurang	Instruktif
2010	15,50	Kurang	Instruktif
2011	19,49	Kurang	Instruktif
2012	20,16	Cukup	Instruktif
Rata-Rata	15,84	Kurang	Instruktif

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 9 di atas maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis₁: “Diduga bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam tujuh tahun terakhir (2006-2012) baik” **di tolak**.

B. Analisis Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (X₂)

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari Bappeda Kota Pekanbaru terhadap Rasio Kemampuan Daerah dapat dilihat pada Tabel 10. Kemudian berdasarkan data pada Tabel 10 ditentukan kriteria penilaian kemampuan daerah yang dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 10. Perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2006-2012

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Daerah	Rasio Kemampuan (%)
2006	104.462.323.814	893.325.943.924	11,69
2007	109.039.133.688	976.145.588.174	11,17
2008	147.875.831.331	1.108.542.215.122	13,34
2009	134.868.382.528	1.034.499.825.397	13,04
2010	158.830.632.372	1.187.806.410.910	13,37
2011	255.903.389.579	1.538.734.000.000	16,63
2012	309.534.196.196	1.578.094.000.000	19,61
Rata-Rata			14,12

Sumber: Bappeda Kota Pekanbaru dan Data Diolah.

Tabel 11. Hasil Penilaian Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2006 – 2012

Tahun	Rasio Kemampuan	Tingkat Kemampuan
2006	11,69	Kurang
2007	11,17	Kurang
2008	13,34	Kurang
2009	13,04	Kurang
2010	13,37	Kurang
2011	16,63	Kurang
2012	19,61	Kurang

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 11 di atas maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis₂ : “Diduga bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam tujuh tahun terakhir (2006-2012) baik.” **di tolak.**

C. Analisis Rasio Aktivitas (X₃)

Pada Tabel 12 berikut adalah data belanja rutin, belanja pembangunan dan total belanja pada APBD yang kemudian diolah untuk mengetahui besarnya rasio aktivitas keuangan daerah yang dipergunakan untuk pembangunan.

Berdasarkan Tabel 12 tersebut diketahui bahwa secara rata-rata alokasi APBD (2006-2012) lebih banyak dialokasikan untuk mendanai pembangunan daerah. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas keuangan untuk pembangunan daerah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam tujuh tahun terakhir (2006-2012) baik, artinya

Hipotesis₃ “diterima”.

Tabel 12. Perhitungan Rasio Aktivitas Keuangan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2006-2012

Tahun	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan	Total APBD	Tingkat Aktivitas ₁	Tingkat Aktivitas ₂
	Dalam (Rp. Milyar)			(%)	
2006	381,284	478,325	859,609	44,36	55,64
2007	422,768	539,929	962,967	43,90	56,10
2008	482,898	590,588	1.073,487	44,98	55,02
2009	535,209	610,250	1.145,459	46,72	53,28
2010	588,376	605,559	1.191,152	49,40	50,84
2011	746,931	700,444	1.447,374	51,61	48,39
2012	798,148	785,200	1.583,348	50,41	49,59
Rata-Rata				47,34	52,69

Sumber: Data Diolah

D. Analisis Rasio Efektifitas (X₄)

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari Dipenda Kota Pekanbaru terhadap Rasio Efektifitas dapat dilihat pada Tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13. Perhitungan Rasio Efektifitas Keuangan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2006-2012

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat Efektifitas (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2006	124.898.123.345	104.462.323.814	83,64
2007	135.675.935.222	109.039.133.688	80,37
2008	150.050.435.899	147.875.831.331	98,55
2009	143.935.564.346	134.868.382.528	93,70
2010	186.300.599.712	158.830.632.372	85,26
2011	199.875.033.184	255.903.389.579	128,03
2012	278.809.355.585	309.534.196.196	111,02
Rata-Rata			97,22

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dan Data Diolah

Tabel 14. Hasil Penilaian Efektifitas Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2006 – 2012

Tahun	Rasio Efektifitas	Kriteria
2006	83,64	Cukup Efektif
2007	80,37	Cukup Efektif
2008	98,55	Efektif
2009	93,70	Efektif
2010	85,26	Cukup Efektif
2011	128,03	Sangat Efektif
2012	111,02	Sangat Efektif

Tahun	Rasio Efektifitas	Kriteria
Rata-Rata	97,22	Efektif

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 13 di atas dapat diketahui besarnya rasio efektifitas keuangan daerah. Dengan demikian dapat ditentukan penilaian efektifitas keuangan daerah Kota Pekanbaru yang dapat dilihat pada Tabel 14.

Berdasarkan Tabel 14 di atas dapat diketahui bahwa efektifitas keuangan daerah selama 7 (tujuh) tahun sejak 2006 sampai dengan 2012 rata-rata adalah efektif. Dengan demikian, sesuai dengan hipotesis yang diduga sebelumnya bahwa efektifitas keuangan daerah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam tujuh tahun terakhir (2006-2012) adalah efektif, maka disimpulkan Hipotesis₄ “diterima”.

E. Analisis Rasio Efisiensi (X₅)

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari Dipenda Kota Pekanbaru terhadap Rasio Efisiensi dapat dilihat pada Tabel 16 di bawah ini.

Tabel 15. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2006-2012

Tahun	Realisasi PAD	Biaya Pungut PAD	Rasio Efisiensi (%)
2006	104.462.323.814	90.223.116.000	86,37
2007	109.039.133.688	98.451.956.650	90,29
2008	147.875.831.331	107.393.790.000	72,62
2009	134.868.382.528	112.743.419.500	83,60
2010	158.830.632.372	123.941.531.400	78,03
2011	255.903.389.579	145.993.751.800	57,05
2012	309.534.196.196	163.940.467.779	52,96
Rata-Rata			74,42

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data pada Tabel 16 di atas maka ditentukan kriteria penilaian efisiensi keuangan yang dapat dilihat pada Tabel 17 di bawah ini.

Tabel 16. Hasil Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2006-2012

Tahun	Rasio Efektifitas	Tingkat Kemampuan
2006	86,37	Cukup Efisien
2007	90,29	Kurang Efisien
2008	72,62	Efisien
2009	83,60	Cukup Efisien

Tahun	Rasio Efektifitas	Tingkat Kemampuan
2010	78,03	Efisien
2011	57,05	Sangat Efisien
2012	52,96	Sangat Efisien
Rata-Rata	74,42	Efisien

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 17 di atas dapat dilihat bahwa secara rata-rata efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dikatakan efisien. Dengan demikian H_5 efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam tujuh tahun terakhir (2006-2012) efisien “**diterima**”.

F. Analisis Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (X_6)

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 18 di bawah ini.

Tabel 17. Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2006-2012

Tahun	Tahun Dasar	PAD _{t0}	PAD _{t1}	Rasio Pertumbuhan
2007	2006	104.462.323.814	109.039.133.688	4,38
2008	2007	109.039.133.688	147.875.831.331	35,62
2009	2008	147.875.831.331	134.868.382.528	-8,80
2010	2009	134.868.382.528	158.830.632.372	17,77
2011	2010	158.830.632.372	255.903.389.579	61,12
2012	2011	255.903.389.579	309.534.196.196	20,96
Rata-Rata				21,60

Sumber : Data Diolah.

Berdasarkan Tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa secara rata-rata pertumbuhan PAD Kota Pekanbaru adalah positif dengan nilai 21,60%. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis₆ yaitu pertumbuhan keuangan daerah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam tujuh tahun terakhir (2006-2012) baik “**diterima**”.

G. Tingkat Kemiskinan Kota Pekanbaru (Y)

Data kemiskinan yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 19 berikut.

Tabel 18. Persentase Keluarga Fakir-Miskin dan Berumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan Dalam Kota Pekanbaru

Tahun 2006-2012

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
1	2006	754.467	16.300	2,16
2	2007	779.899	17.700	2,24
3	2008	799.213	29.740	3,63
4	2009	802.788	33.420	3,92
5	2010	897.768	38.200	4,26
6	2011	937.939	32.338	3,45
7	2012	964.558	32.901	3,42

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru

H. Analisis Hubungan Antara Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah dengan Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi yang distandarkan, yaitu:

$$TKm = -5,117TKp - 1,332A - 0,473EfK - 5,994Efs - 1,885TP$$

dimana: TKm = Tingkat Kemiskinan; TKp = Tingkat Kemampuan; A = Aktivitas; EfK = Efektifitas; Efs = Efisiensi; TP = Tingkat Pertumbuhan

Untuk uji T atau uji parsial, karena seluruh t hitung bernilai negatif, artinya t_{hitung} pasti lebih kecil dari t_{tabel} , ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil uji F (Uji Simultan) di atas, diperoleh F_{hitung} sebesar 0,251 dan F_{tabel} sebesar 2,52 dengan nilai signifikansi 0,09. Karena $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai probabilitasnya $< 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dengan rasio kemampuan, rasio aktivitas, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan tidak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Pekanbaru (rasio kemandirian, kemampuan, aktivitas, efektifitas, efisiensi, dan pertumbuhan keuangan daerah) terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru, sehingga Hipotesis₆ “ditolak”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian masih dalam kriteria “kurang” dengan pola hubungan dengan Pemerintah Pusat yang bersifat “instruktif”. Tingkat kemampuan masih dalam kriteria “kurang”. Aktivitas keuangan untuk pembangunan termasuk dalam kriteria “baik”. Efektifitas keuangan termasuk dalam kriteria efektif. Efisiensi keuangan termasuk dalam kriteria “efisien”. Pertumbuhan keuangan termasuk dalam kriteria “baik”.
2. Tingkat kemiskinan tidak sepenuhnya mengalami penurunan dari tahun-ketahun. Namun demikian penurunan tingkat kemiskinan Kota Pekanbaru terjadi pada tahun 2011 dan 2012.
3. Secara parsial tingkat kemampuan, aktivitas keuangan, efektifitas, efisiensi dan tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru.
4. Secara simultan, tingkat kemampuan, aktivitas keuangan, efektifitas, efisiensi dan tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disarankan hal-hal di bawah ini:

1. Perlunya peningkatan penggalan potensi PAD Kota Pekanbaru untuk lebih meningkatkan besarnya PAD Kota Pekanbaru.
2. Pertumbuhan PAD dalam kategori baik, hal ini hendaknya dipertahankan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Dalam mengelola PAD, pemerintah Kota Pekanbaru termasuk dalam kategori efektif dan efisien, hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.
4. Aktivitas Keuangan Daerah hendaknya lebih besar lagi diperuntukkan bagi pembangunan Kota Pekanbaru.
5. Dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangannya sendiri, maka seharusnya tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru menurun. Artinya, pengelolaan keuangan yang baik oleh Pemerintah Kota Pekanbaru haruslah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Pekanbaru sehingga menurunkan angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, Rudi. 2011. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan, *Jurnal Ilmiah Volume III No.2* ISSN: 1979-0759, Hal. 1-13.
- Astuti, Afriyanto Weni. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Universitas Pasir Pangarayan, Vol 1 No 1* 2013.
- Bisma, I Dewa Gede & Susanto, Hery. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007*. GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daeah*. Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah*. Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
- Mehmood, Rashid & Sadiq, Sara. 2010. *The Relationship between Government Expenditure and Poverty: A Cointegration Analysis*. Romanian Journal of Fiscal Policy, Volume 1, Issue 1, July-December 2010, Pages 29-37.
- Munir, Dasril, Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. YPAPI. Yogyakarta.
- Usman. 2012. Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol 05, No 01.